

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk tindak kejahatan akan terus berkembang seiring waktu berjalan. Namun, mekanisme penegakan kebijakan direktif *The Fifth Anti-Money Laundering Directive* (AMLD-5) juga mencerminkan kematangan struktur supranasional Uni Eropa. Meskipun implementasi akhirnya berada di tangan masing-masing negara anggota, Uni Eropa memiliki sistem pengawasan (seperti FIUs) dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan tiap negaranya. Kemampuan untuk memantau dan mendorong implementasi konsisten di seluruh wilayah yang luas dan beragam ini menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi dan efektivitas regionalisme Uni Eropa. Keberhasilan proses AMLD-5 memiliki implikasi yang lebih luas bagi Uni Eropa sebagai model regionalisme. Ini mendemonstrasikan bahwa meskipun menghadapi tantangan seperti Brexit dan skeptisisme terhadap integrasi Eropa, Uni Eropa tetap mampu berfungsi sebagai entitas supranasional yang efektif. Kemampuan untuk mengkoordinasikan kebijakan kompleks seperti AMLD-5 tidak hanya memperkuat legitimasi Uni Eropa di mata warga negara anggotanya, tetapi juga memposisikan Uni Eropa sebagai contoh keberhasilan regionalisme di panggung global. Hal ini menunjukkan bahwa model integrasi regional Uni Eropa, meskipun tidak sempurna, tetap menjadi salah satu contoh paling maju dari kerja sama antarnegara dalam skala besar.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Direktif Anti-Pencucian Uang Kelima (AMLD-5) oleh Uni Eropa, meskipun membawa kemajuan dalam upaya memerangi pencucian uang melalui pasar seni, penjualan Pasar Seni Eropa di kancah global masih menghadapi tantangan signifikan. Tingkat kepatuhan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan ini bervariasi, dengan beberapa negara menunjukkan keselarasan yang kuat, sementara yang lain tertinggal dalam adopsi dan penegakan regulasi yang diperlukan. Tantangan utama muncul dalam hal transparansi dan uji tuntas yang lebih ketat, khususnya dalam mengidentifikasi sumber dana dan pemilik manfaat sebenarnya. Dimana hal tersebut pun membebankan secara administratif dan menambah biaya tambahan lainnya, Selain itu, meskipun ada peningkatan koordinasi lintas batas dalam penegakan hukum, masih diperlukan harmonisasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas kebijakan di berbagai yurisdiksi. Secara keseluruhan, AMLD-5 telah memperkuat kerangka kerja anti-pencucian uang di Uni Eropa, namun evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk menghadapi teknik pencucian uang yang terus berkembang, terutama dalam sektor pasar seni yang sangat kompleks.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menyarankan bahwa dalam pembentukan kebijakan direktif Anti-Pencucian Uang Uni Eropa terkait regulasi pasar seni, Uni Eropa selaku pembuat kebijakan perlu lebih menyesuaikan lebih lanjut dengan kondisi dan kepentingan tiap negara anggota. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan membuka kemungkinan di mana negara anggota dapat mengimplementasi secara

penuh, sesuai dengan situasi dan kondisi Pasar Seni domestik negara tersebut. Selain itu, peran adanya *Financial Intelligence Unit* (FIU) sebagai penegak kebijakan direktif ini sebaiknya lebih diharmonisasi lagi dalam hubungan antar *Art Market Participant* (AMPs) dengan pihak pemerintah Negara, agar pelaksanaan kebijakan direktif bisa lebih sesuai dan tidak membebankan prosedur administrasi yang harus dipatuhi jika negara tersebut sudah meratifikasi secara penuh.